



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 ☎(0380) 824966 KUPANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 138 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 perlu dikoordinasikan secara terpadu untuk memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; /

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 0075 Seri A Nomor 0075);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 Nomor : 900.918.KU/DPA.116.AK/2016, Tanggal 30 Desember 2016 dengan Kode Rekening 3.00.03.01.01.07.5.2.1.01.03.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Mei 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 138 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 10 MEI 2017

PENGARAH DARI TIM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KET
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2017.	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Bersama Gubernur mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2017.	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *W*

✓
FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 138 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 10 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Melakukan Koordinasi di Bidang : a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017; b. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Tahun Anggaran 2017; c. penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; d. melakukan Koordinasi tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; dan f. bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator I	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2017.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator II	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2017.

4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator III	Merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.
5.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan APBD TA. 2017; b. memimpin Rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2017; c. bertanggungjawab atas Pelaksanaan, Penatusahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2017; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
6.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 yang tepat waktu; b. mengkoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2017; c. mengkonsolidasi Laporan Keuangan dari Perangkat Daerah/UKPD pengelola dana APBD Tahun Anggaran 2016; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban;

7.	Kabid Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD TA. 2017; b. mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017; c. mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Perubahan APBD TA. 2017 serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub; d. meneliti dan mengoreksi DPA Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah; dan e. mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bahan penyusunan Anggaran Perubahan Daerah TA. 2017.
8.	Kabid Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan langkah-langkah operasional pengelolaan keuangan daerah meliputi : menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menandatangani SP2D; b. koordinator TPKN; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD TA. 2017 oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; dan d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah.

9.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan; dan</p> <p>b. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.</p>
10.	Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengarahkan dan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017, serta Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 pada 22 Kab/Kota;</p> <p>b. melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 di 22 Kab/Kota;</p> <p>c. menganalisis rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 di 22 Kab/Kota dan menyampaikan kepada Kepala BPPKAD;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. melakukan koordinasi pencatatan dan pelaporan barang milik daerah TA. 2017 pada BPPKAD.</p>

11.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi bidang pajak bersama UPT Badan dan instansi terkait agar tercipta kesamaan pemahaman guna pengamanan penerimaan pajak daerah TA. 2017; dan</p> <p>b. menyelenggarakan, menghimpun dan menyusun produk hukum dibidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.</p>
12.	Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan lain-lain, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan penyusunan laporan bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Perwakilan Kementerian Keuangan di NTT; dan</p> <p>b. menyelenggarakan langkah-langkah operasional Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada.</p>
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan pemetaan dan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pengelolaan barang milik daerah TA. 2017; dan</p> <p>b. mengoreksi dan meneliti konsep keputusan Gubernur NTT tentang pelaksanaan sensus barang.</p>
14.	Kepala Sub Bagian PDE pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah TA. 2017 dan pelaporan kinerja lainnya yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan masukan bagi atasan.

15.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA. 2017; b. memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran badan TA. 2017; dan c. mengontrol administrasi pengelolaan anggaran agar tertib administrasi.
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
17.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang & Penerimaan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017; b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah TA. 2017; c. melakukan verifikasi Perangkat Daerah, SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisa Kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku Bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD.

18.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT untuk bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU/LS, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya; dan d. melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset daerah provinsi TA. 2017.
19.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkaji dan atau mengolah data laporan keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016; d. menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan; e. menyusun dan merencanakan pengelolaan keuangan TA. 2017; dan f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi.

20.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun konsep KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD TA. 2017 bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. menyiapkan bahan-bahan dan data serta memfasilitasi pembahasan RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan; c. mereviu dan membahas RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang perubahan APBD TA. 2017; d. menyusun dan meneliti konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan lampirannya; e. menyusun dan meneliti Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD bersama lampiran buku penjabaran Perubahan APBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan; f. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah; g. menyusun rencana anggaran belanja provinsi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang akan dibiayai dari dana DAK.
21.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta membantu menyusun konsep tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi DPRD tentang Nota Keuangan khusus yang berkaitan dengan Bidang Administrasi Umum; b. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD TA. 2017 dan Perubahan APBD Bidang Administrasi Umum; c. menyiapkan bahan materi dan menyusun pedoman, standar satuan harga dan analisis belanja daerah, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia pedoman penyusunan anggaran yang berpihak pada masyarakat;

			<ul style="list-style-type: none"> d. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Administrasi Umum; e. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; f. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; dan g. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk penyusunan Anggaran Daerah Bidang Administrasi Umum.
22.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Kesra pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2017 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan Kabupaten/kota; dan d. melakukan konsultasi dengan Instansi/Pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

23.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengkaji kelayakan materi Rancangan Perubahan APBD TA. 2017 serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan; b. menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti; c. mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD TA. 2017 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan d. menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi data APBD TA. 2017, Perubahan APBD TA. 2017 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD secara baik dan benar.
24.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua serta perkembangannya; b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua; c. mengkaji dan mengidentifikasi Perubahan APBD TA. 2017 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 Kabupaten/Kota; dan d. melaksanakan koordinasi pengusulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar.

25.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III pada Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyajikan data keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao TA. 2017 dalam format evaluasi; b. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya; dan c. menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2017 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2016 Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.
26.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Pajak pada Bidang Pajak Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi pajak daerah berdasarkan sistematika administrasi laporan pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah, demi terselenggaranya administrasi pajak daerah yang tertib dan akuntabel; b. melaksanakan kegiatan verifikasi atas realisasi penerimaan pajak daerah dan penggunaan bukti pajak daerah, dalam rangka pengamanan penerimaan pajak daerah dan penggunaan bukti pajak daerah; c. melakukan pengolahan data atas hasil evaluasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah dan penggunaan bukti pungutan pajak daerah; d. melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan Pajak bersama instansi terkait; dan e. melakukan konsultasi pajak daerah dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penatausahaan dan verifikasi pajak.

27.	Kepala Sub Bidang Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan pada Bidang Pajak Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan kajian terhadap obyek kendaraan bermotor pasif berturut-turut 5 (lima) tahun tidak melaksanakan pembayaran pajak; b. melaksanakan kegiatan restitusi dan pemindahbukuan atas pemberian keringan pajak; c. melaksanakan pengkajian atas pengajuan keberatan pajak oleh wajib pajak; d. membuat usulan penghapusan kepada Gubernur NTT atas obyek pajak kendaraan bermotor, karena rusak berat, hilang, kena bencana, mutasi keluar wilayah NTT tanpa melalui prosedur yang berlaku; e. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
28.	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak pada Bidang Pajak Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota berdasarkan potensi; b. melaksanakan kegiatan identifikasi tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak rokok; c. melaksanakan pemantauan terhadap mekanisme pungutan Pajak Daerah; d. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi bidang pajak daerah bersama instansi terkait; e. melakukan penelitian dan pengkajian atas potensi pajak daerah.

29.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum pada Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendaharawan pada Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi; b. menguji kelayakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan maupun Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan serta Barang dan Jasa; c. meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana; d. memaraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah; dan e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer, dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN).
30.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan; b. menghimpun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; c. melakukan penagihan piutang daerah; dan d. melaksanakan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.

31.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara pada Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengujian penghitungan Fihak Ketiga (PFK), gaji, terusan gaji, duka wafat, duka tewas, kekurangan gaji, gaji susulan, PPh, PPN, PPh 21, bulog, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan Perumahan dan memantau penyeteroran PFK; b. melakukan rekonsiliasi penagihan Fihak Ketiga dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan; c. membuat Surat Konfirmasi dana Transfer (SKT) ke Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi NTT di Kupang; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang diperintahkan kepala bidang perbendaharaan; e. melakukan Data Transaksi Harian (DTH), penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah pada setiap hari kerja; f. melaksanakan dan menatausahakan investasi kas daerah; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek; dan h. mengirimkan dokumen-dokumen (B.IX, keterangan saldo, rekonsiliasi bank) ke Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Kepala Bidang Perbendaharaan.
32.	Kepala Sub Bidang Retribusi pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, perubahan dan penyesuaian tarif serta penghitungan piutang Retribusi Daerah; b. melaksanakan koordinasi teknis pungutan retribusi; c. menyusun kebijakan pengembangan obyek Retribusi Daerah dan optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah; d. menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan terkait dengan penerimaan Retribusi Daerah; e. melaksanakan pembukuan pungutan retribusi; dan f. melaksanakan identifikasi tunggakan retribusi.

33.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-lain pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi peraturan Penerimaan Lain-Lain, agar terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya kepada Daerah guna peningkatan PAD; b. melaksanakan koordinasi teknis pungutan Penerimaan Lain-Lain; c. melaksanakan dan mengevaluasi serta rekonsiliasi penerimaan PAD sektor Penerimaan Lain-Lain; d. menyusun kebijakan pengembangan obyek Penerimaan Lain-Lain dan optimalisasi penerimaan Penerimaan Lain-Lain; e. mengevaluasi kegiatan pungutan Penerimaan Lain-Lain; dan f. melaksanakan pemantauan terhadap mekanisme pungutan retribusi, pada SKPD.
34.	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dan melakukan sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data dana perimbangan serta penerimaan Bagi Hasil Pajak dan penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak; b. melaksanakan pencatatan/pembukuan dana perimbangan bagi hasil PBB, DAU, DAK, Cukai Tembakau, PPh Pasal 21, 25, 29 WPOPDN dan Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah (SDA, PSDH) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi; c. menyelenggarakan rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait; d. melaksanakan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak Pusat (PPh Pasal 21, 25, 29 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah; e. menyelenggarakan rapat koordinasi PPh Pasal 21, 25, 29 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah; f. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dana perimbangan dengan instansi terkait.

35.	Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoreksi dan menganalisis olahan data rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit dan pengadaan dilingkungan pemerintah provinsi berdasarkan data masukan untuk menyusun program pengadaan barang; b. menyusun dan memetakan daftar kebutuhan barang milik daerah, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dan daftar barang milik daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Aset, kemudian ditetapkan dengan keputusan Gubernur; c. mengkoordinir dan merekap pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP) atau daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dituangkan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); dan d. menghimpun laporan barang semesteran dan tahunan yang disampaikan oleh pengguna/kuasa pengguna menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan selanjutnya.
36.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dan mengkaji serta memetakan barang milik daerah yang dapat dimanfaatkan, dipindahtanggankan dan dihapus; b. merumuskan naskah perjanjian/kontrak pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan c. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

37.	Kepala Sub Bidang Pengamanan Penyelesaian Sengketa pada Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyelesaian sengketa barang milik daerah serta memetakan dan menelusuri riwayat asal usul dan bukti perolehan barang milik daerah sesuai arahan pimpinan agar tidak terjadi penghilangan atau penyalahgunaan;</p> <p>b. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>c. meneliti dan mengoreksi kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data atas barang milik daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar barang milik daerah; dan</p> <p>d. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.</p>
38.	Ivoni Santalia Meok, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil-wakil Ketua menyelesaikan tugas-tugas yaitu Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
39.	Jun Erna Nawi , SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
40.	Vincentia Nona, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
41.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

42.	Charles Nehemia Polin, A. Md/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
43.	Juliana Selfintje Ngale, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
44.	Yeti Marliana Toda, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
45.	Wahyu Santi, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
46.	Fransiskus X. Seli Tokan, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
47.	Afliana N. B. Seran, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
48.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
49.	Nuzulul Atmayudha Putri, SE/Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

50.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	
51.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
52.	Lisa S.P. Davidz, SP, M.Sc/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		Membantu Wakil-wakil Ketua dalam menyelenggarakan langkah-langkah operasional dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
53.	Mariano Sabinus Tefa, S. STP/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
54.	Yakobis Dano, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
55.	Maria Selvyana Lalu Beo, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
56.	Arifin, S.Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
57.	Angelia Heleni Hayong, S. Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		
58.	Samuel Ndun, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		

59.	Patrisia Maria Arthania, SE/Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
60.	Heriyanto Jemi, SE/Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
61.	Juanita Bengngu, A.Md/Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
62.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
63.	Urias Nomleni/Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil-wakil Ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahunn Anggaran 2017 pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
64.	Sisilia Ina Openg/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
65.	Rosalia Ria, S.Sos/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
66.	Ita Kana, SH, MM/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
67.	Teresa De Jesus, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
68.	Sandra Benyamin, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

69.	Lori N. Sioh, S.Sos/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
70.	Linda Ch. Oey/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
71.	Sartje Y. Bakie/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
72.	Christian Hartono Mamulak, SH/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
73.	Dessy Nathaly Leo, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
74.	Sesilia Yosephina Pati, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
75.	Ivony M. de Hoog/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
76.	Celsilia Denciana/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
77.	Lourdes Vicente Viegas/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
78.	Yesi M.A. Mabilehi, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

79.	Mahyudin Rais, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
80.	Anita Damaris Pello, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
81.	Mikail Suan/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
82.	James R. Wurarah, S.Pi/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
83.	Elisabeth N. Mesah, S.Sos/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
84.	Antonius Fuka, S.Sos/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
85.	Simon Kopong Bebe, SH/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
86.	Jori Bawa, SE/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
87.	Hilaria M. Lengga/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
88.	Carlina C. Melok, A.Md/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
89.	Maria L.E.B Noemay, A.Md/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

90.	Erich A. Boro, A.Md/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
91.	Nurmi Wahyuni, A.Md/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
92.	Anselma Magdalena/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
93.	Sandy A.J.L. Pranadjaya/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
94.	Ferdinan Poli/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
95.	Marselinus Tahu Tetik/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
96.	Yefrid Nabuasa/Staf Sekretariat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil-wakil Ketua dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang Perbendaharaan.
97.	Dina R. T. Djawa, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
98.	Ristyowati, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
99.	Anesta M. Nesimnasi, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

100.	Martha Moni Balu,SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
101.	Agatha Lusia Abuk, A.Md/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
102.	Moises D. Rego/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
103.	Agustina Letde/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
104.	Yane A. Watileo/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
105.	Helena W. Yacoba Lema, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
106.	Asran Irawan Sanda, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
107.	Adel Maryquin A. Maing, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

108.	Wilhelmus P. Geto/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
109.	Normalina Taebenu/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
110.	Abdul Haris Mau, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
111.	Bernadinus Petrus Tahu, S. IP/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
112.	Matheos Wenyi, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
113.	Jabalnur Kanda, S. Sos/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
114.	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
115.	Marselina Ariany Pekambani, S.STP/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

116.	Ita Marlina Feri Aritonang, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
117.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
118.	Reginaldo Kapilawi, SE/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
119.	Siprianus Pita/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
120.	Sandra Angela Suratama, A. Md/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
121.	Welmince Baitanu, A. Md/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
122.	Rudy A. Modok/Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

123.	Yustus Sapay, BA/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil-wakil Ketua dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan APBD Kabupaten dan Kota meliputi Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I (Flores), Wilayah II (Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Rajua) dan Wilayah III (Timor dan Rote Ndao) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
124.	Ni Wayan Bagiani,SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
125.	Magdalena A. Wila Tiro, S.Sos/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
126.	Arkalaus Libing/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
127.	Y. B. Eko Prasetyo, SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
128.	A. A. Watu Raka, S. Sos/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
129.	Yane Kornelia Liu, SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
130.	Yusran H. Syafrudin, S. STP//Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

131.	Christina Mega Putri Komar, S. IP/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
132.	Felixianus Siger Loba Randu, SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
133.	Ivo Timbul Siboro, SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
134.	Putri Rani Ari Sandi, SE/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
135.	Frederikus Ralph Mite/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
136.	Christian Nalle/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
137.	Adrianus Banu/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
138.	Andri Anin/Staf Bidang Pembinaan Kab/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

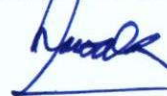
139.	Maria I.T Lina, ST/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Penetapan Pajak Daerah melalui Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
140.	Kristoforus R. Hayon, S.Kom/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
141.	Firminus Kapitan/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
142.	Widyartha Tejakusuma/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
143.	Benny E.B. Foenai/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
144.	Luh Astiti Ariati A.Md, Akun/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
145.	Novita Adris Pasu, A.Md/Staf Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
146.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua dalam menyelenggarakan langkah-langkah operasional Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-Lain, Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.
147.	Mariam Aras, S.Sos/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
148.	Ramlan H. Nahrawi, SE/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

149.	Lili Chrisna Toelle/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
150.	Didrik J. Peter Brand/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
151.	Kefi Z.M. Taku Bessi, SE/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
152.	Ema Goran Tokan/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
153.	Debora Kondo/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
154.	Frangky T. Mone/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
155.	M.U. Ratu loli/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
156.	Albertus Lama Hoda/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
157.	Melkisedek Koa, A.Md/Staf Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

158.	Johanis Bunga, ST/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa aset, penilaian aset dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
159.	Hilaria De J. Mendes, SH/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
160.	Maria Dizi/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
161.	Dorthia Dami/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
162.	Florinda da Costa Soares/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
163.	Marcel Freddy Elim, ST/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
164.	Agnes H.K. Tunliu/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
165.	Maria Indah Imakulata, S.Sos/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
166.	Novrianus Dangga, S.STP/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

167.	Semapritu Ndaomanu/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset, pengamanan, penyelesaian sengketa aset, penilaian aset dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
168.	Alfret D.I. Tunliu, A.Md/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
169.	Marselina Ratu, A.Md/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
170.	Mikael Tanono/Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

l a.n. GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003